

ANALISIS MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI EMPAT DESA SUNGAI ABU KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR

MALYUNIR, S. Ap¹⁾

Drs. H. MAT RAMAWI, M.M²⁾, **ANTRI MARIZA QADARSIH, S.Sos., M.Si**³⁾

STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

Email :

Malyunr7@gmail.com

Matramawi@gmail.com

Teiqadarsih@gmail.com

ABSTRACT

Malyunir, 2021. This study aims to determine the benefits of the Harapan Family Program (PKH) in four villages of Sungai Abu, Sub-District of Air Hangat Timur. This type of research. Data collection techniques in this study used interviews and observation methods, where interviews were conducted with ten informants who were village heads, village secretaries, section heads, heads of affairs and community receiving (PKH).

The findings of the research showed that overall the benefits of the Harapan Family Program (PKH) in the four villages were categorized as good, there were several aspects that were good, including: First, The Output the benefits of the Harapan Family Program (PKH), namely; 1) Membership Coverage, 2) Quality of Health and Education Services, 3) Access to Health and Education Services. Second, The Outcome, the benefits of the Harapan Family Program (PKH), namely; 1) Positive Impact, and 2) Negative Impact.

Keywords: *Benefit Analysis PKH, Public Policy, PKH*

ABSTRAK

Malyunir, 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Empat Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi, dimana wawancara dilakukan terhadap 10 orang informan yang merupakan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Masyarakat penerima PKH.

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Kabupaten Kerinci dapat dikategorikan sudah baik, ada beberapa aspek sudah baik diterapkan antara lain: Pertama, Output manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu; 1) Cakupan Kepesertaan, 2) Mutu Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, dan 3) Akses Pelayanan Kesehatan dan

Pendidikan. Kedua, Outcome manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu; 1) Dampak Positif, dan 2) Dampak Negatif. Adanya manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dengan baik akan mengentaskan kemiskinan khususnya di Kabupaten Kerinci, dan dapat menjadi acuan di dalam pengambilan kebijakan untuk kemajuan suatu pemerintah daerah.

Kata Kunci : Analisis Manfaat PKH, Kebijakan Publik, PKH

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat mengembangkan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi: Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Sedangkan dalam PP 5 tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Salah satu program yang dilaksanakan oleh pemerintahan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), melalui PKH pemerintah berharap dapat membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhannya melalui pemberian dana bantuan untuk menyekolahkan anak mereka dan mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak. PKH berupa bantuan tunai yang dikhususkan pada pendidikan dan kesehatan. PKH merupakan salah satu upaya pemerintah dalam proses pelebagaan perlindungan sosial dan kesejahteraan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

Dari sisi kebijakan, PKH merupakan cikal bakal pengembangan sistem perlindungan sosial khususnya bagi keluarga miskin. PKH yang mewajibkan RTSM menyekolahkan dan memeriksakan kesehatan anak-anaknya. Melalui kebijakan yang mengupayakan terjadinya peningkatan pada sisi permintaan (demand) keluarga miskin terhadap layanan pendidikan, kesehatan dan gizi yang baik, PKH diharapkan akan berdampak pada perubahan pola pikir masyarakat miskin untuk memiliki generasi penerus yang lebih berkualitas dan mandiri.

Berdasarkan uraian sebelumnya maka penulis berpendapat perlu dilakukan kajian ilmiah tentang pengelolaan dana desa, khususnya yang terkait dengan peran BPD dalam pemerintah desa dengan judul **“Analisis Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) Di Empat Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur”**.

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) Di Empat Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) Di Empat Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur.

Manfaat Penelitian

Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbanga pemikiran, informasi, dan menjadi bahan referensi dalam ilmu pemerintahan khususnya tentang mengkaji permasalahan analisis manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Empat Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur.

Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan semoga dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran di pemerintahan daerah Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci. Bagi peneliti, sebagai wahana untuk melatih berfikir secara ilmiah melalui teori-teori yang didapat dalam aspek pemerintahan dan sarana belajar untuk memahami permasalahan yang menjadi topik kejadian.

Tinjauan Pustaka

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)

Menurut Hasibuan bahwa fungsi manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian.

Dengan demikian manajemen SDM pada saat sekarang ini telah mengalami perubahan dibandingkan pada masa sebelumnya, seperti yang diungkapkan oleh Dessler dalam Deri Febrina (431:2014) yang mendefinisikan manajemen sumber daya manusia pada era informasi ini, yaitu: *“Strategic Human Resource Management is the linking of Human Resource Management with strategic role and objectives in order to improve business performance and develop organizational cultures and foster innovation and flexibility”*. Terlihat bahwa para pimpinan organisasi harus mengaitkan pelaksanaan manajemen sumber daya manusia dengan strategi organisasi untuk meningkatkan kinerja, serta mengembangkan budaya organisasi yang akan mendukung penerapan inovasi dan fleksibilitas.

Kebijakan Publik

Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan sosial salah satu bentuk kebijakan publik yang mengatur kesejahteraan sosial. Sebagaimana dijelaskan pada pengantar, makna “kebijakan” pada kata “kebijakan sosial” adalah “kebijakan publik”, “sedangkan makna “sosial” menunjuk pada bidang kesejahteraan. Bagian ini menjelaskan konsep-

konsep mengenai kebijakan publik dan beberapa aspek yang terkait dengannya. bahasan mengenai apa saja yang termasuk dibidang kebijakan sosial dan kesejahteraan sosial.

Lingkungan Kebijakan

Lingkungan merupakan semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Sedangkan menurut Munadjat Danusaputro, dikatakan bahwa lingkungan merupakan semua benda dan kondisi termasuk manusia dan perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi serta berkaitan dengan kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Kebijakan lingkungan adalah setiap tindakan sengaja diambil [atau tidak diambil] untuk mengelola kegiatan manusia dengan maksud untuk mencegah, mengurangi, atau mengurangi efek yang merugikan pada sumber daya alam dan alam, dan memastikan bahwa buatan manusia perubahan lingkungan tidak memiliki efek berbahaya pada manusia.

Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
2. Jenis manfaat yang dihasilkan
3. Derajat perubahan yang diinginkan
4. Kedudukan pembuat kebijakan
5. Siapa pelaksana program
6. Sumber daya yang dikerahkan.

lingkungan kebijakan mencakup:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
2. Karakteristik lembaga dan penguasa
3. Kepatuhan dan daya tanggap

Implementasi Kebijakan

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal yang penting yakni (Mulyadi, Deddy, 2015: 13):

1. Persiapan sumber daya, unit, dan metode
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan
3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Di Indonesia sendiri, ada enam faktor yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya proses implementasi:

1. Kualitas kebijakan itu sendiri.
2. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran).
3. Ketetapan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah dan lainnya).
4. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, dan pengawasan).
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak).
6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik di mana implementasi tersebut dilakukan.

Frekuensi Pengawasan Kebijakan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan istilah pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi. Menurut Winardi, Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilakukan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan.

kebijakan teknis pengawasan menjabarkan kebijakan pengawasan ke dalam kegiatan pengawasan dengan memperhatikan:

1. Metode atau pendekatan strategi yang dipandang efektif.
2. Kapasitas sumber daya manusia.
3. Alat atau jenis pengawasan/kegiatan yang akan digunakan.
4. Waktu dan jumlah waktu pelaksanaan yang dibutuhkan untuk mencapai target kinerja suatu kebijakan.
5. Jumlah anggaran yang dibutuhkan.
6. Pengaturan lain yang memungkinkan diterbitkannya Laporan Hasil Pengawasan (LHP) atas program pengawasan dalam skala nasional, skala regional, atau skala daerah.

Program Keluarga Harapan

Pengertian PKH

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM) yang telah ditetapkan sebagai peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Sasaran PKH adalah Rumah Tangga/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM). Peserta PKH adalah RTSM/KSM yang memenuhi satu atau beberapa kriteria yaitu memiliki ibu hamil/ibu menyusui/ibu nifas/anak balita. Anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah), anak SD/MI (usia 7-12 tahun), anak SLTP/MTsN (usia 12-15 tahun) dan anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

Tujuan PKH

Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku peserta PKH yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target *Millennium Development Goals* (MDGs).

kewajiban peserta PKH, antara lain, yaitu:

1. Ibu hamil/nifas
 - a. Pemeriksaan kehamilan di faskes sebanyak 4 kali dalam tiga kali trimester
 - b. Melahirkan oleh tenaga kesehatan di faskes
 - c. Pemeriksaan kesehatan 2 kali sebelum bayi usia 1 tahun.

2. Lansia 70 tahun ke atas
 - a. Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau mengunjungi puskesmas
 - b. Mengikuti kegiatan sosial.
3. Penyandang disabilitas berat
 - a. Pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan
 - b. Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan ke rumah.
4. Anak sekolah
 - a. Usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar (SD, SMP, SLTA) yaitu terdaftar di sekolah/pendidikan kesetaraan dan minimal 85% kehadiran dikelas.
5. Balita
 1. Usia 1-5 tahun: yaitu imunisasi tambahan dan pemeriksaan berat badan setiap bulan
 2. Usia 5-6 tahun: pemeriksaan berat badan setiap 1 bulan dan mendapatkan VIT A sebanyak 2 kali dalam setahun
 3. Usia 6-7 tahun: timbang badan di faskes.
6. Bayi
 - a. Usia 0-11 bulan: imunisasi lengkap serta pemeriksaan berat badan setiap bulan
 - b. Usia 6-11 bulan: mendapat suplemen vit A.

Proses Penyelenggaraan PKH

Proses penyelenggaraan PKH oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2019) meliputi, yaitu (a) perencanaan, (b) penetapan calon peserta PKH, (c) validasi data calon peserta PKH, (d) penetapan KPM PKH, (e) penyaluran dana bansos PKH, (f) pendamping PKH, (g) peningkatan kemampuan keluarga, (h) verifikasi komitmen KPH, (i) pemuktahiran data PKH, dan (j) transformasi kepesertaan PKH.

Regulasi Terkait dengan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Dasar hukum pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), antara lain, yaitu:

1. Peraturan Presiden tentang Bantuan Sosial Non Tunai
2. PMK No. 228.05.2016 tentang Perubahan Atas PMK No.254.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga
3. Pemensos tentang Pelaksanaan PKH (finalisasi)
4. SK Dirjen Nomor 12/LJS.SET.OHH/09/2016 Tentang Pedoman Umum PKH Perjanjian Kerjasama dengan Bank Himbara (BNI, BRI, BTN, dan Mandiri)

Manfaat PKH

Program Keluarga Harapan (PKH) dalam jangka pendek memberikan efek pendapatan (*income effect*) kepada rumah tangga miskin melalui pengurangan beban pengeluaran, dan dalam jangka panjang seperti telah dikemukakan, dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas

kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak di masa depan (*price effect* anak keluarga miskin) memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya (*insurance effect*).

Indikator Penelitian

Indikator evaluasi menurut Bridgman dan David (Golda Oktavia, dan dkk, 2015) dipilih untuk menilai output dan outcome dari Program Keluarga Harapan (PKH). Fokus penilaian untuk indikator output adalah apakah hasil dari kebijakan dan berapa orang yang berhasil mengikuti kebijakan tersebut. Sedangkan fokus penilaian untuk indikator outcome adalah apa dampak dari program keluarga harapan di Kabupaten Kerinci, baik dampak positif maupun dampak negatif, yang diterima oleh masyarakat dan pihak yang terkena kebijakan.

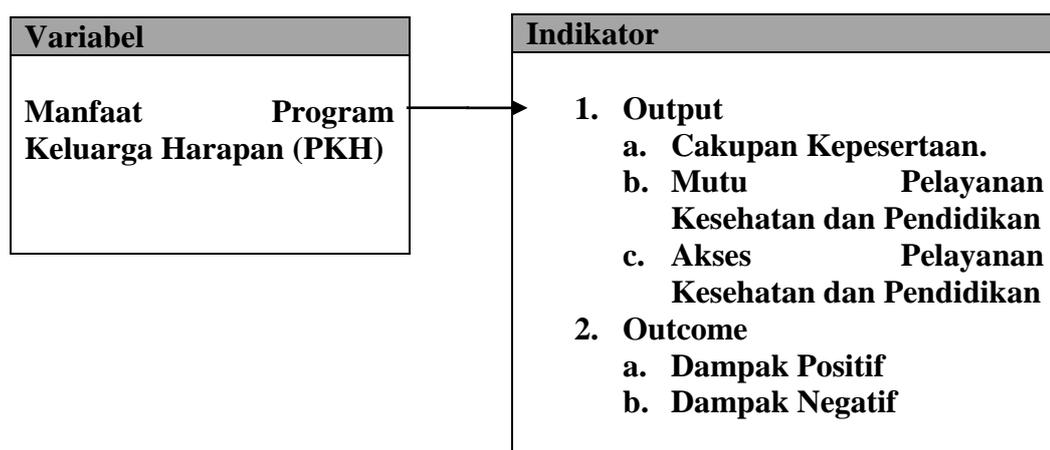
Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian Raudhotul Jannah (2019) diketahui bahwa proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rawaterate sudah berjalan dengan baik, terlihat dari proses kegiatan pertemuan awal, sosialisasi pendamping, pencairan bantuan, pemutakhiran data dan verifikasi komitmen peserta. Serta kendala yang dihadapi selama pelaksana PKH di lapangan, antara lain keterlambatan informasi yang di berikan pusat kepada daerah sehingga menyulitkan pendamping untuk meneruskan informasi tersebut kepada peserta PKH, terutama dalam hal pencairan dan bantuan dan verifikasi data.

Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka konseptual terhadap permasalahan diatas tergambar dalam skema dibawah ini.

Gambar 1.1
Indikator Penelitian



Sumber: Bridgman dan David (Golda Oktavia, dkk, 2015)

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Sehingga penulis ini akan mendeskripsikan bagaimana analisis manfaat program keluarga harapan (pkh) di empat desa sungai abu kecamatan air hangat timur, hambatan yang ditemui dalam mewujudkan strategi pemerintah dan upaya dalam penyelesaiannya. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.

Kemudian menurut Sugiyono (2014,9), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Informan Penelitian

Usaha untuk menemukan informan dapat dilakukan dengan cara menurut Moleong Lexy.J (2006:133), diantaranya yaitu:

- (1) Melalui keterangan orang yang berwenang, baik secara informal maupun (pemerintah) maupun secara informal (pemimpin masyarakat seperti tokoh masyarakat, pemimpin adat, dan lain-lain).
- (2) Melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti.

Sehingga penulis menemukan informan untuk penelitian ini terdiri dari Pemerintah Kabupaten Kerinci beserta perangkatnya yang dijadikan sampel. Informan dari unsur pemerintahan diataranya, yaitu:

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kepala Seksi
4. Kepala Urusan
5. Masyarakat Penerima PKH

Jenis Data

Jenis data yang akan diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer
Yaitu data yang didapatkan langsung dari objek penelitian melalui wawancara mendalam dengan informan. Dan dengan cara observasi lapangan dari lembaga yang terkait.
2. Data sekunder
Yaitu data yang diperoleh dari laporan-laporan dan dokumen-dokumen yang didapatkan pada kantor Pemerintah Desa Kabupaten Kerinci.

Teknik dan Alat Pengumpulan Data

1. Wawancara
2. *Observasi*
3. Studi Dokumentasi

Unit Analisis

Indikator yang digunakan peneliti adalah Bridgman dan David dalam (Golda Oktavia, dan dkk, 2015) dipilih untuk menilai output dan outcome dari manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Empat Desa Sungai Abu tersebut.

Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

Adapun prosedur dalam analisis data kualitatif menurut Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman dalam Sugiyono (2014: 246-253), terdiri dari:

1. Data *Reduction* (Reduksi Data)
2. Data *Display* (Penyajian Data)
3. *Conclusion Drawing/ Verification*.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kerinci. Hal ini sesuai dalam mewujudkan Analisis Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Empat Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur.

Jadwal Penelitian

Tabel 1.2
Jadwal Penelitian

NO	KEGIATAN	Septembe				Oktober				November				Desember				Januari				Februari			
		r																							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengusulan Judul		■																						
2	Judul disetujui				■																				
3	Mempersiap proposal					■	■																		
4	Seminar Proposal								■																
5	Pengambilan Data									■	■	■	■												
6	Analisis Data													■	■	■	■								
7	Ujian Skripsi																								
8	Perbaikan Skripsi																								

bagi generasi selanjutnya. Koordinasi dan komunikasi antar pihak-pihak terkait juga menjadi faktor yang terwujudnya tujuan dari implementasi program.

Dampak Negatif

Adapun dampak negatifnya antara lain ada beberapa warga yang bermental miskin sehingga memungkinkan warga yang sebenarnya tergolong mampu ikut mengakses pelayanan kesehatan, terjadi diskriminasi antara pasien umum dengan pasien penerima PKH, serta adanya selisih biaya kesehatan yang merugikan pihak rumah sakit. Jadi, masih ada berbagai dampak negatif dengan adanya bantuan PKH ini di Empat Desa Sungai Abu Kecamatan Air Panas Timur Kabupaten Kerinci.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan serta dikemukakan saran-saran yang sekiranya berguna bagi Pemerintah daerah dalam memberikan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat miskin daerah pedesaan oleh di Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur sebagai bahan pertimbangan untuk mengadakan perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu didalam penyelenggaraan pemerintah Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur dalam memberikan manfaat program tersebut. Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. *Output*, terdapat berbagai *output* dari manfaat program keluarga harapan di Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci
 - a. Cakupan Kepesertaan.
 - b. Mutu Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
 - c. Akses Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
4. *Outcome*, terdapat berbagai *outcome* dari manfaat program keluarga harapan di Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci
 - a. Dampak Positif
 - b. Dampak Negatif

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayangMu telah memberikan ku kekuatan dan membekaliku dengan ilmu. Atas karunianya serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam terlimpahkan buat Rasulullah Muhammad S A W.

Selesainya penulisan skripsini, tidak lepas dari bantuan, saran, arahan bimbingan sertas dukungan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya dari lubuk hati yang paling dalam kepada :

1. Bapak Murlinus, S.H.M.H Selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nusantara Sakti (STIA_NUSA) Sungai Penuh.

2. Bapak Ade Nurama Jaya Putra, S.Sos, M.AP selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara.
3. Bapak Drs. H. Mat Ramawi, M.M selaku pembimbing utama dalam penulisan skripsi ini telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama penulisan skripsi dan mengikuti perkuliahan pada Program Studi Administrasi Negara STIA-NUSA Sungai penuh.
4. Ibuk Antri Mariza Qadarsih, S.Sos., M.Si selaku pembimbing pendamping dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan informasi, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Ibu para dosen Program Administrasi Negara STIA-NUSA Sungai Penuh yang telah mendidik dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Orang tua dan kakak adik tercinta yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang.
7. Terakhir penulis ingin menyampaikan kepada rekan-rekan seperjuangan Program Administrasi Negara STIA-NUSA Sungai Penuh yang telah membantu dan memberikan informasi yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ramdhani dan M. Ali, Ramdhani. 2017. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. (PDF). *Jurnal Publik, Vol. 11, No. 01, 2017, 1-12.* (www.jurnal.uniga.ac.id).
- Antriya, Eka Suwinta dan Indah, Prabawati. 2016. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. *Jurnal Kajian Kebijakan Publik, Volume 1, Nomor 1, tahun 2016, hal.0-216*
- Atika, Chandra. 2016. Implementasi Kebijakan Kementerian Sosial Dalam Program Keluarga Harapan di Kota Tanjung Pinang Tahun 2015 (Studi Kasus di Kecamatan TanjungPinang Barat). *Universitas Maritim Raja Ali Haji.*
- BAPPENAS. 2009. Pedoman Evaluasi dan Indikator Kinerja Pembangunan. Kedeputan Evaluasi Kinerja Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2009.
- Deddy Mulyadi. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik.* Bandung: Alfabeta.
- Dedy Utomo, Abdul Hakim, Heru Ribawanto. 2020. PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP RUMAH TANGGA MISKIN (Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan. *Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 1, Hal. 29-34.*

- Dharmesti Wulandar dan Mayling Oey Gardiner. 2013. Analisis Ketetapan Sasaran Manfaat Program Keluarga Harapan Berdasarkan Karakteristik Perumahan dan Demografis Rumah Tangga. Jakarta: Universitas Indonesia
- Erna, Fidyatun. 2012. Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Kesehatan di Kabupaten Brebes Tahun 2011. *Jurnal Kesehatan Masyarakat, Volume 1, Nomor 2, hal.26-36.*
- Emmanuel, Raju, Dewaid Van Niekork. 2013. Intra-Government Coordination For Sustainable Disaster Recovery: A case-study Of The Eden District, South Afrika. *International Journal Of Disaster Risk Reduction 4* (2013), 92-99.
- Erwan Agus Putwanto & Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya di Indonesia). Yogyakarta: Gava Media.
- Fitria, Nur Anggraeni. 2017. Kesiapan Penggunaan Uang Elektronik Sebagai Fasilitas Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan. *Economics Development Analysis Journal 6 (1), (2017), ISSN 2252-6965, hal.40-47.*
- Ghina Febrina. 2014. Analisis pelaksanaan program keluarga harapan di kabupaten brebes tahun 2014. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Golda Oktavia, Hartuti Purnaweni, Aloysius Rengga. 2015. Evaluasi output dan outcome pada program jaminan kesehatan masyarakat kota (JAMKESMASKOT) di Kota Semarang.
- Harry, Hikmat. 2017. Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2017. *Kementerian Sosial Republik Indonesia.*
- Hasibuan, Malayu. 2011. Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2019. Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2019.
- Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 8/M Tahun 2005.
- Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 38/HUK/2011 tentang Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan.
- Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 4/HUK/2011 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Kementerian Sosial RI Tahun 2011.
- Keputusan Direktur Jenderal Direktur Bantuan dan Jaminan Sosial Nomor BPJ/8505/04/v/2009 tentang Pedoman Umum Program Keluarga tahun 2009.

- Maya, Dehani, dan dkk. 2017. Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. *Jurnal Governansi*, p-ISSN 2442-3971, Volume 4, Nomor 1, April 2018, hal.45-56.
- Menteri Sosial Republik Indonesia No. 202/MS/12/2018 tentang Dukungan Dana Daerah Penyerahan PKH minimal 5%.
- Nurul, Najidah dan Hesti, Lestari. 2011. Efektivitas Program Keluarga Harapan (KH) di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang.
- Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
- Inpres Nomor 1 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
- Lexy, Moleong. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
- Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI.
- Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial RI.
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
- Raudhotul Jannah. 2019. Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rawaterate Jakarta Timur. Jakarta: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH Sugiyono. 2014. Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Slamet, Agus Purwanto dan dkk. 2013. Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Wacana*, Volume 16, Nomor 2, tahun 2013, ISSN: 1411-0199, hal. 79-96.

- Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: Pusaka Pelajar.
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Utari. 2018. Kinerja Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan di Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dari Tahun 2014-2016. *Jurnal Wacana Kinerja*, Volume 21, Nomor 1, Juni 2018, hal. 73-94.
- Yuni, Astuti. 2016. Persepsi Masyarakat Prasejahtera Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu Tahun 2015. *Universitas Lampung, Skripsi*.